

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Kebijakan Jepang dalam menarik pasukan Pasukan Bela Diri dari misi pemeliharaan perdamaian di Sudan Selatan membuat komunitas internasional mempertanyakan citra Jepang sebagai negara penyedia keamanan. Dengan menganalisis menggunakan kerangka realisme neoklasik, maka ditemukan bahwa fenomena tersebut dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti kondisi Sudan Selatan yang semakin memburuk dan mengancam keamanan Jepang, tidak ditemukannya konsensus elit dan rumitnya dinamika politik Jepang, opini publik yang cenderung menentang peran Pasukan Bela Diri dalam misi internasional, dan budaya strategis antimiliterismenya yang terus melekat. Aspek-aspek ini sejalan dengan premis realisme neoklasik yang mengungkapkan bahwa suatu kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh aspek domestik yang menerjemahkan aspek eksternal, sehingga peranan aspek domestik lebih utama. Dari keseluruhan aspek, budaya strategis memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi setiap aspek yang ada.

Budaya strategis antimiliterisme menjadi budaya strategis dominan Jepang semenjak kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Dengan menggunakan indikator sejarah, ditemukan bahwa budaya strategis menciptakan konsensus elit.

Adanya konflik perang yang terjadi sebelum terbentuknya Doktrin Yoshida membuat konsensus elit menjadi aspek yang penting dan menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan keamanan Jepang di tingkat Diet. Hal itulah yang dapat dilihat dari tidak ditemukannya konsensus elit dalam pembicaraan perluasan wewenang Pasukan Bela Diri dalam misi internasionalnya di Sudan Selatan. Komeito sebagai salah satu partai politik di Jepang yang berorientasi terhadap perdamaian menjadi aktor dominan yang membawa budaya strategis ini. Komeito berperan sebagai *moderating party* yang mendominasi penentangan terhadap penempatan Pasukan Bela Diri dalam misi pemeliharaan perdamaian di Sudan Selatan dibawah kerangka UU Keamanan 2015. Pembicaraan itu semakin dipersulit dengan adanya fakta bahwa LDP sebagai partai yang berkuasa di Jepang saat itu memiliki koalisi dengan Komeito, sehingga dukungan Komeito menjadi sangat penting bagi LDP dan posisinya dalam Diet.

Dengan melihat indikator geografis, dapat ditemukan bahwa posisi Jepang yang terisolasi menciptakan opini publik yang merasa bahwa Jepang tidak perlu untuk melakukan kontribusi melalui Pasukan Bela Diri dalam misi pemeliharaan perdamaian di Sudan Selatan. Hal ini sebenarnya juga berkaitan dengan indikator sejarah, dimana kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II masih meninggalkan luka yang mendalam bagi publik Jepang. Penentangan publik terhadap pengiriman Pasukan Bela Diri dalam misi pemeliharaan perdamaian terlihat dari demonstrasi dan survei yang dilakukan media kabar Jepang, seperti

Asahi dan Manichi Shimbun. Survei menunjukkan bahwa publik Jepang cenderung menolak penggunaan kekuatan oleh Pasukan Bela Diri dalam misi pemeliharaan perdamaian karena dikhawatirkan akan mengancam keamanan dari Pasukan Bela Diri Jepang itu sendiri. Namun begitu, budaya *wa* atau harmoni masih dibawa oleh aktor, dalam hal ini adalah publik, karena walaupun mereka menentang kontribusi Pasukan Bela Diri dalam penggunaan kekuatan militer, mereka sebenarnya mendukung Jepang untuk berkontribusi terhadap perdamaian melalui pendekatan-pendekatan non-militer, salah satunya seperti *human security*.

Preferensi terhadap keamanan manusia turut menjadi alasan budaya strategis memainkan peran penting dalam kebijakan Jepang menarik Pasukan Bela Diri dari misi pemeliharaan perdamaian di Sudan Selatan. Preferensi tersebut menimbulkan kecenderungan Jepang untuk memilih kebijakan-kebijakan yang mengutamakan keamanan manusia. Dalam konteks ini, kebijakan yang dipilih ialah dengan tetap mengirimkan bantuan teknis dan finansial ke Sudan Selatan. Hal itu ditunjukkan dengan sejumlah bantuan yang diberikan Jepang pasca penarikan mundur Pasukan Bela Diri di Sudan Selatan secara resmi.

#### **4.2. Saran**

Sebagai suatu penelitian, tentunya tidak lepas dari kekurangan. Kekurangan dari penelitian ini adalah datanya yang terbatas pada riset pustaka.

Penelitian dengan topik serupa akan lebih baik dengan mencantumkan hasil analisis wawancara dengan pakar kebijakan luar negeri atau politik Jepang. Kekurangan ini dapat menjadi saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu untuk memperkaya data dengan data primer untuk membantu peneliti mendalami kebijakan luar negeri Jepang.

Selain itu, penelitian ini menganalisis mengenai alasan mengapa budaya strategis Jepang memiliki peran dominan dalam kebijakan penarikan Pasukan Bela Diri dalam misi pemeliharaan perdamaian di Sudan Selatan. Untuk melengkapi dan memperkaya penelitian dalam fenomena serupa, dapat disarankan agar penelitian selanjutnya dapat berfokus terhadap inkonsistensi dari ekspor persenjataan dalam industri pertahanan Jepang. Penelitian selanjutnya dapat mengulik lebih lanjut mengenai budaya strategis ini, dan apakah budaya strategis ini memiliki potensi untuk terus bertahan atau dapat tergantikan dengan budaya strategis lainnya.